

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Chaeruddin Djoeharie ^a, Hendrikus T. Gedeona^b, Sait Abdullah ^c

^a Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

^{b,c} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a charuddindjauharie@yahoo.com, ^b hendrikusgedeona@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi di Kota Cimahi mendorong masyarakat menggunakan kendaraan semakin banyak. Akibatnya, permintaan lahan parkir meningkat, retribusi parkir meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah Kota Cimahi. Namun sejak tahun 2018-2020, target pendapatan retribusi parkir di Kota Cimahi setiap tahunnya mengalami penurunan dan memberikan kontribusi yang terlalu rendah terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif, Analisis SWOT, Analisis AHP dan Analisis Hirarki Proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Penyusunan Kebijakan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi perlu untuk dievaluasi, kondisi sarana dan prasarana belum maksimal, faktor penghambat implementasi retribusi parkir di Kota Cimahi yaitu kurang pantauan dari personil dinas terkait di lapangan. strategi peningkatan penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan prioritas strategi adalah Memanfaatkan potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum; Dijalankannya program Terminal Parkir Elektronik (TPE); Meningkatkan pengawasan melalui koordinasi dengan instansi lain (Satpol PP, Kepolisian, dsb) dan membentuk tim pengawas khusus perparkiran; Pemasang *Closed Circuit Television* (CCTV) di setiap lokasi parkir tepi jalan umum.

Kata Kunci: Strategi kebijakan, Retribusi Parkir, Kota

Strategies for Increasing Receipt of Parking Fees in The Cimahi City of Transportation Departement

Abstract

Increasing socio-economic activities in Cimahi City encourage people to use more vehicles. As a result, the demand for parking lots increases, parking fees increase, which in turn increases the regional income of Cimahi City. However, since 2018-2020, the target for parking retribution revenue in Cimahi City has decreased every year and has contributed too lowly to regional income. This research uses Descriptive Analysis, SWOT Analysis, AHP Analysis and Process Hierarchy Analysis. The results of the study indicate that the Parking Retribution Policy Development Process at the Cimahi City Transportation Service needs to be evaluated, the condition of facilities and infrastructure is not optimal, the inhibiting factor for the implementation of parking fees in Cimahi City is the lack of monitoring from relevant service personnel in the field. the strategy for increasing parking retribution revenue at the Cimahi City Transportation Service based on strategic priorities is to utilize the potential for public roadside parking retribution receipts; Implementation of the Electronic Parking Terminal (TPE) program; Improve supervision through coordination with other agencies (Satpol PP, Police, etc.) and form a special parking supervisory team; Closed Circuit Television (CCTV) installation at every public roadside parking location.

Keywords: Policy strategy, Parking Retribution, City

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

A. PENDAHULUAN

Di negara maju, urbanisasi pada dasarnya merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah, makin tinggi derajat urbanisasinya (*level of urbanization*). Kawasan perkotaan mempunyai peranan yang besar terhadap ekonomi wilayah/negara. Sebesar 50% sampai dengan 60% *Gross Domestic Product* (GDP) digerakkan oleh kegiatan ekonomi di perkotaan (industri, perdagangan, dan jasa). Hal ini ditandai dengan adanya perubahan/pergeseran struktur ekonomi dengan sektor primer (pertanian) berubah menjadi sektor sekunder (industri) dan sektor industri mengarah menjadi sektor tersier (jasa).

Dalam manajemen transportasi, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki empat prinsip yakni, keamanan/ keselamatan (*safety*), tertib dan teratur (*regularity*), kenyamanan (*comfort*), dan ekonomis. Departemen Perhubungan sebagai instansi Pemerintah (*regulator*) berkewajiban untuk membina terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, efisien, dan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut sasarannya adalah terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti kapasitas mencukupi, terpadu, tertib, teratur, lancar, cepat, tepat, selamat, aman, nyaman, biaya terjangkau, dan efisien dalam arti beban publik rendah dan utilitas yang tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi.

Salah satu masalah yang sering ditemui adalah masalah perparkiran. Istilah perparkiran berasal dari kata parkir yang berarti keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan, tempat parkir adalah tempat untuk menaruh kendaraan. Perparkiran menjadi masalah umum yang hampir dialami disetiap kota-kota besar di Indonesia. Dengan berkembangnya potensi ekonomi suatu kota tentu mengundang daya tarik pendatang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi, semakin banyak pendatang yang berada di suatu kota maka kota tersebut

perlu menyediakan lahan atau tempat dimana dapat menampung kapasitas kendaraan baik dalam keadaan terparkir ataupun bergerak.

Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan kendaraan pribadi juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Semakin mudah memiliki kendaraan pribadi, pengguna jalan raya akan semakin meningkat dengan pesat. Bukan hanya penggunaan jalan raya saja, akan tetapi lahan pemberhentian kendaraanpun mulai menjamur dan tidak beraturan. Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena pembukaan lahan parkir secara legal maupun ilegal di tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti di pasar tradisional, pasar modern (mini market/supermarket/mall), Bank/ATM, rumah sakit, ruko, dan jalan raya.

Pengelolaan parkir diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perparkiran kota, termasuk dalam pengelolaan lahan parkir. Apabila pengelolaan parkir di suatu kota berjalan dengan baik, bukan hanya akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saja, akan tetapi parkir dapat juga dapat menjadi salah satu sumber dana yang potensial untuk dikelola dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu sumber PAD yang cukup potensial di Kota Cimahi adalah retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase target retribusi parkir dibandingkan dengan target PAD lainnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 Kota Cimahi memiliki target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp. 1.596.697.350,00, tahun 2019 sebesar Rp. 1.466.872.734,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 857.077.904,00. Adapun perbandingan target PAD dari retribusi parkir dengan total target PAD yang dikelola oleh Dishub Kota Cimahi

Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi juga menjadi penyebab munculnya parkir tidak resmi. Peningkatan Jumlah alat transportasi pribadi yang sangat tinggi, baik sepeda motor maupun mobil dirasakan sangat praktis untuk mendukung berbagai bentuk

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

aktivitas usaha ataupun yang lainnya. Akan tetapi peningkatan alat transportasi yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan dan penyediaan lahan parkir layak yang berdampak pada kemacetan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan kebijakan retribusi parkir di Dishub Kota Cimahi dalam kurun waktu 2018-2020?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasarana perparkiran di Kota Cimahi?
3. Bagaimana pengelolaan parkir pada dinas perhubungan Kota Cimahi ?
4. Strategi apa yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam meningkatkan jumlah pendapatan retribusi parkir?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis proses penyusunan kebijakan retribusi parkir di Dishub Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2018-2020;
2. Menganalisis kondisi sarana dan prasarana bagaimana implementasi kebijakan perparkiran yang dilaksanakan oleh Dishub Kota Cimahi;
3. Menganalisis pengelolaan parkir di Dishub Kota Cimahi;
4. Merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Dishub Kota Cimahi..

B. PEMBAHASAN

Proses Penyusunan Kebijakan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi Selama Tahun 2018-2020

Proses penetapan target retribusi parkir di Kota Cimahi melibatkan beberapa dinas/lembaga. Diantaranya; Dishub Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi (BPKAD,

Bappenda dan TAPD), serta DPRD Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya yang berperan penting dalam proses penetapan target retribusi parkir ada di Dishub Kota Cimahi, Bappenda dan DPRD Kota Cimahi..

Dalam rangka untuk menemukan suatu formula yang tepat, maka Pemerintah Kota diwakili Dishub mengusulkan menggunakan system pengelolaan sendiri dengan melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan perparkiran baik itu parkir tepi jalan umum maupun parkir insidentil (parkir sementara/bila ada event tertentu) dan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Seksi Perparkiran Dishub Kota Cimahi. Di tahun 2020 Dishub Kota Cimahi mempunyai target pendapatan dari retribusi parkir sebesar 857.077.904 . Target tersebut lebih rendah dibanding target tahun lalu (2019) yang ditetapkan sebesar Rp 1.466.872.734. Padahal pada tahun lalu (2019) Dishub Kota Cimahi sudah mampu mengumpulkan Rp 1.615.719.194,- atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 10,15%. Namun, pada kenyataannya RPJMD tersebut tidak bisa langsung diterapkan naik, karena penyusunan target setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini tentu saja secara capaian realisasi keuangan akan mempengaruhi kinerja Dishub Kota Cimahi menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa target retribusi parkir di Kota Cimahi pada tahun berikutnya minimal sebesar Rp 1.449.050.000,-. Kemudian setelah dimasukkan ditambahkan nilai prediksi berdasarkan trend capaian retribusi parkir tahun sebelumnya. Dengan adanya rumus pasti tersebut, diharapkan dapat memicu Dishub Kota Cimahi dalam mengelola perparkiran.

Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Berdasarkan perhitungan *Internal Factor Analysis Summary/IFAS* dan *External Strategic Factor Analysis Summary/ EFAS* bahwa titik

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

kordinat berada pada angka $(-0,22, 0,96)$, sehingga letak kuadran faktor internal eksternal pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Dishub Kota Cimahi dapat diketahui bahwa posisi pengelolaan Perparkiran Dishub Kota Cimahi dalam kegiatan retribusi parkir ada di kuadran III. Kuadran III ini adalah kuadran negatif dan positif dimana organisasi memiliki peluang yang baik namun disertai kelemahan sehingga peluang yang baik tadi tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

Pada kondisi tersebut, strategi yang seharusnya diambil oleh Dishub Kota Cimahi adalah strategi defensif artinya organisasi disarankan untuk melakukan restrukturisasi strategi atau kebijakan sebelumnya. Hal ini karena strategi yang digunakan Dishub Kota Cimahi dalam menyelenggarakan retribusi parkir yang dipakai masih kurang efektif dan kurang optimal.

Berdasarkan skala prioritas pada tabel tersebut maka alternatif strategi dengan skala tertinggi adalah Memanfaatkan potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum. Dijalankannya program Terminal Parkir Elektronik (TPE), Meningkatkan pengawasan melalui koordinasi dengan instansi lain (Satpol PP, Kepolisian, dsb) dan membentuk tim pengawas khusus perparkiran, Pemasang *Closed Circuit Television* (CCTV) di setiap lokasi parkir tepi jalan umum hingga membuka layanan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung (*on line*). Hasil perhitungan skala prioritas tersebut sejalan dengan pendapat Kotler dan Fox (dalam Yoeti, 2002:1) mengingatkan perumusan suatu strategi harus berdasarkan dan berpedoman kepada: *Environment analysis, Resource Analysis dan Goals Formulation Steps*. Dalam perumusan strategi peningkatan PAD, dianjurkan dilakukan melalui tiga tingkatan, yaitu : *Pertama*, Melakukan analisis terhadap potensi tempat parkirnya. *Kedua*, Penyusunan strategis yang menyangkut kebijakan pemerintah daerah tentang perparkiran. *Ketiga*, Strategi pembangunan untuk pengembangan perparkiran menyangkut aksesibilitas, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya.

Perumusan Model Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Faktor standar dan tujuan dilakukan penyesuaian dengan organisasi Dishub Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan perbaikan kebijakan yang menjelaskan tentang Kebijakan Retribusi Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Kebijakan tersebut harus dilengkapi dengan standar prosedur operasional sebagai penjelasan langkah teknis bagi pelaksana agar prosedur kerja dan pelayanan yang diberikan terstandarisasi. Indikator kinerja perlu disusun untuk kepentingan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.

Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Cimahi belum dimanfaatkan secara optimal untuk itu perlu satu strategi peningkatan penerimaan parkir tepi jalan umum dengan melakukan perbaikan terutama perbaikan dalam sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Cimahi. Sistem pengelolaan merupakan kunci utama untuk menentukan keberhasilan kinerja penyelenggaraan parkir tepi jalan umum.. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan strategi ini antara lain, membentuk satuan petugas khusus untuk melakukan pemutakhiran data potensi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sehingga perhitungan potensi sebagai dasar penetapan target dapat lebih tepat dan sesuai dengan potensi yang sebenarnya di lapangan

Sistem satu pintu yang terkomputerisasi juga dapat meningkatkan kenyamanan para pengguna jasa parkir tepi jalan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum.

Strategi alternatif yang perlu dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kota Cimahi seperti marka parkir, karcis parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, papan informasi mengenai tarif

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

parkir dan sistem pungutan yang diberlakukan, dan lain-lain, juga perlu dilakukan selain sebagai upaya meningkatkan pelayanan jasa parkir, strategi ini juga dapat mendukung strategi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi parkir di Kota Cimahi.

Memperbaiki mekanisme penetapan besaran setoran retribusi parkir tepi jalan umum oleh juru parkir juga merupakan upaya strategi yang perlu diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi karena Selama ini mekanisme setoran yang ditetapkan kepada para juru parkir legal adalah sistem setoran harian (*flat*) yang besarnya didasarkan pada kesepakatan antara juru parkir/koordinator parkir dengan Dinas Untuk itu, ke depan perlu adanya perbaikan mekanisme penetapan besaran setoran dan membedakan besaran setoran antara *weekdays* dan *weekend* sehingga besarnya setoran retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dapat lebih mencerminkan potensi yang sebenarnya di lapangan.

Salah satu strategi penting yang perlu diambil Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam rangka mendukung strategi peningkatan penerimaan pendapatan retribusi parkir adalah dengan memberikan *reward* tambahan bagi juru parkir yang mau bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi, misalnya pemberian pelatihan keterampilan parkir, jaminan asuransi kesehatan, pemberian kemudahan akses untuk mengikuti kejar paket pendidikan, dan sebagainya.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Simpulan

Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Kebijakan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi perlu dievaluasi.
2. Kondisi sarana dan prasarana parkir belum maksimal dan implementasi kebijakan sarana dan prasarana perparkiran belum menjadi prioritas untuk itu kebijakan perlu ditingkatkan, omunikasi antara eksekutif dengan legislatif perlu ditingkatkan.

3. Salah satu strategi yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah kesemrawutan lalu lintas adalah dengan melaksanakan pengelolaan dan penataan perpajakan, akan tetapi pada kenyataannya implementasi pengelolaannya masih belum optimal.
4. strategi peningkatan penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan prioritas strategi adalah:
 - a) Memanfaatkan potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum;
 - b) Dijalankannya program Terminal Parkir Elektronik (TPE);
 - c) Meningkatkan pengawasan melalui koordinasi dengan instansi lain (Satpol PP, Kepolisian, dsb) dan membentuk tim pengawas khusus perparkiran;
 - d) Pemasang *Closed Circuit Television* (CCTV) di setiap lokasi parkir tepi jalan umum;
 - e) Penambahan anggaran operasional terkait kegiatan retribusi parkir tepi jalan umum, 6. Membuat alur/sistem pelaksanaan (SOP) yang jelas terkait pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum;
 - f) Menambah ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan parker;
 - g) Pemberian sanksi yang tegas bagi juru parkir (resmi) / juru parkir liar;
 - h) Melakukan studi banding ke daerah lain yang pengelolaan parkirnya sudah lebih baik;
 - i) Membuka layanan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung (*on line*)

Saran

1. Pemerintah Kota Cimahi diharapkan segera melakukan koordinasi lintas sektor untuk memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah/Walikota tentang Penetapan target pendapatan retribusi parkir.
2. Komunikasi terbuka harus diperkuat dengan melakukan pertemuan berkala yang melibatkan pengambil keputusan dan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

pelaksana sistem pengelolaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Pendidikan dan pelatihan perlu diselenggarakan dengan target utama pelaksana pelayanan perpajakan dapat dilakukan secara bertahap dengan topik seputar pengelolaan perpajakan.

3. Penelitian lanjutan dapat dikembangkan oleh para peneliti di bidang administrasi publik untuk melibatkan lebih banyak responden dan dilakukan pada lokus penelitian yang lain.

REFERENCE

- Arikunto, Suharsimi., 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (edisi revisi V), Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bryson, M John. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Creswell, W John. 2009. *Oualitative Inguiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publication
- Ernest, Dale. 1995. *Planning and Developing the Company Organization Structure*, American Management Association
- Halim, Abdul dan Mujib. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, AMP YKPN, Yogyakarta
- Jones.R.Gareth. 2004. *Organizational Theory, Design and Change: Text and Cases,Fourth Edition*. New Jersey: Person Education,Inc.Upper Saddle River
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafiika Persada
- Keban Yeremias. 2000. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:Teori,konsep dan isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kertapraja, Koswara. 2010. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Inner
- Maleong J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. New York: SAGE Publications
- Muhammad, Suwarsono. 2008. *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Riyadi dan Bratakusumah, DS. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Saladin. Djaslim. 2004. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian*. Bandung: PT. Linda Kayra
- Salusu, J. 2004. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Non Publik*. Angkasa, Bandung
- Satori dan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta
- Siagian. 2007. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: CV Haji Masagung
- Sidik, Machfud. 2004. *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi*. Jakarta: LP3NI.
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data: Dalam Aplikasi Pemasaran*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Thoha, Miftah, 2000. *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Bogor. Pusdiklat Pegawai Depdiknas
- Wrihatnolo, Randy R dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: PT. Gramedia

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Yoeti, A. Oka. 2002. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata, PT. Pradnya Paramita: Jakarta*

Gedeona, Hendrikus Triwibawanto 2010. *Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik. Volume VII Nomor 3 September 2010. Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung*

Haryanti, Nita dkk 2015, *Strategi Pengelolaan Perparkiran di Kota Salatiga. Jurusan Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro.*

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004
Tentang Otonomi Daerah

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan

Undang undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 27 Tahun
2020 Tentang Tarif Retribusi Jasa Umum